

BAB II

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

1.1 Sejarah PKB dan NU

Salah satu agenda reformasi yang diperjuangkan yaitu kebebasan membentuk partai politik supaya demokratisasi dapat tercapai. Berbagai partai politik dengan macam-macam ideologi dan platform muncul menjelang Pemilu 1999 tidak terkecuali partai-partai politik yang mengusung ideologi Islam. Semasa reformasi, pada tahun 1998 Ketua Umum PBNU, Abdurrahman Wahid mendeklarasikan partai politik baru, PKB, yang secara organisatoris terpisah dari NU. Meskipun secara organisatoris PKB tidak memiliki ikatan lambing/lal dengan NU namun secara emosional partai ini sangat dekat dan lekat dengan warga NU, terbukti dalam besarnya dukungan para tokoh dan ulama NU yang secara langsung terjun dalam politik atau sebagai juru kampanye dalam Pemilu.¹³ Bahkan lambing/symbol yang digunakan PKB mirip dengan NU, serta struktur organisasi PKB sama dengan NU yaitu dewan Tanfidziyah dan Dewan Syuriah. (<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240806/Seteru-Tak-Kunjung-Padam-PKB-Vs-PBNU/>, diakses pada tanggal 21 April 2025)

Pasca reformasi dan euphoria pendirian partai politik berimbas juga ke organisasi sosial keagamaan Islam di mana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai banyak mendapat usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air untuk mendirikan partai. Tercatat ada 39 nama parpol yang di usulkan, nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan

Kebangkitan Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Adapun unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang Sembilan dan warna hijau, ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH.M.Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.

Banyaknya masukan dan tuntutan pendirian partai dari kaum *nahdliyin* tersebut, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini dikarenakan NU terbatas oleh hasil muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan praktis. Akibat kegamangan sikap PBNU akhirnya banyak pihak dan kalangan NU yang tidak sabar langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantaranya yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon.

Melihat atusiasme warga *Nahdliyin* di daerah, PBNU kemudian mengadakan rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima tersebut diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin (Rais Syuriah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota; KH.M.Dawam Anwar (katib Aam PBNU), Dr.KH.Said Aqil Siradj, MA (Wakil Katib Aam PBNU), HM. Rozy Munir, SE, M.Sc (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekertaris Jenderal PBNU).

Berdasarkan rapat Tim Lima maka dideklarasikanlah parpol yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diharapkan dapat menampung aspirasi warga NU pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Deklarasi ini dilakukan pada tanggal 23 Juli 1998 di kediaman KH. Abdurrahman Wahid (Ketua Umum PBNU) di Ciganjur Jakarta Selatan. Deklaratornya terdiri dari tokoh-tokoh kunci dalam struktur PBNU yaitu: KH. Ilyas Rukhiat (Tasikmalaya), KH. Munasir Ali (Mojokerto), KH. Mustofa Bisri (Rembang), K.H. Muchit Muzadi (Jember) dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku Ketua Umum PBNU.

Perolehan suara PKB sebagai partai politik baru yang mendapat suara cukup signifikan dibanding partai politik yang berlabel Islam lainnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor dana ada faktor-faktor lain seperti, pertama, pengakuan dan pemberian restu oleh PBNU atas pendirian PKB. Kedua, peran pesantren NU (dan para kyai sebagai pengasuhnya) sebagai jaringan komunikasi politik yang efektif. Ketiga, sosok dan peran Gus Dur yang memiliki reputasi yang baik sehingga bisa menarik simpati dari mayoritas warga NU untuk mendukung dan memilih PKB. Meskipun dalam perjalanannya, kelahiran PKB yang difasilitasi oleh PBNU ini tidak serta merta disepakati oleh seluruh warga NU. Setelah PKB dideklarasikan ternyata masih ada warga NU yang tidak mendukung dan bergabung dengan PKB. Diantara mereka bahkan tetap berada di PPP dan ada juga yang tetap di Golkar, bahkan sebagian dari pihak yang tidak menerima kebijakan PBNU tentang PKB, justru mendirikan partai sendiri seperti Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang mengusung KH. Solahudin Wahid (adik Gus Dur) sebagai ikon partai itu, Partai Nahdhatul Ulama (PNU) oleh KH. Syukron Makmun, dan SUNI yang

juga menuntut restu dari PBNU.

(<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240806/Seteru-Tak-Kunjung-Padam-PKB-Vs-PBNU/>, diakses pada tanggal 21 April 2025)

1.2 Ketegangan Politik antara DPP PKB dan PBNU

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai yang lahir di era Reformasi. Partai ini lahir berdasarkan inisiasi dari tokoh-tokoh organisasi keagamaan Islam yang besar yaitu Nahdhatul Ulama. Pada pemilu 1999, PKB memperoleh suara yang cukup signifikan yaitu lebih dari 12 persen. Hasil ini menjadikan PKB memiliki posisi tawar yang diperhitungkan dalam pencalonan Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai Calon Presiden yang dipilih oleh MPR tahun 1999. Dalam perjalanannya, langkah politik PKB untuk menjadi partai yang diperhitungkan tidak berjalan mulus. Konflik internal partai menjadi jalan terjal yang harus dilalui PKB selama dekade pertama.

Data menunjukkan bahwa PKB mengalami setidaknya tiga kali konflik internal yang berdampak pada penurunan suara dari pemilu ke pemilu. Konflik internal pertama terjadi pada tahun 2001 antara Gusdur dan Matori Abdul Jalil. Konflik kedua terjadi pasca pemilu 2004 antara Gusdur dan Alwi Shihab. Konflik ketiga terjadi cukup memanas antara Gusdur dan Muhaimin Iskandar tahun 2008 yang kemudian berdampak pada terbentuknya dua kubu PKB dan berimbas pada penurunan perolehan suara PKB yang cukup drastis pada pemilu 2009. (Ismail, 2009)

Pembahasan mengenai PKB sudah cukup banyak dikaji. Seperti yang dilakukan oleh Firman Noor (2015) yang melihat tingkat perpecahan dan soliditas

Partai Islam seperti PKB dan PKS dilihat dari aspek pelebagaan partai. Kamarudin (2008), yang menguraikan konflik Internal di PKB⁴ dan kajian Pusat Penelitian Politik LIPI (2008) mengenai pelebagaan partai politik pasca Orde Baru di mana salah satu bab-nya membahas mengenai pelebagaan PKB. Akan tetapi, kajian-kajian tersebut dilakukan dalam rentang waktu dekade awal PKB berdiri. Sedangkan tulisan ini akan membahas mengenai pelebagaan PKB pasca Pemilu 2009 di mana PKB masih konsisten memegang nilai-nilai yang menjadi ideologi partai, bagaimana PKB melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik, dan bagaimana PKB mampu mengatasi konflik internal demi menjaga kohesivitas partai yang akhirnya semua hal ini berpengaruh pada perolehan suara PKB pada pemilu 2014.

Konflik merupakan keniscayaan bagi negara dengan sistem kepartaian yang multipartai, di mana beragam kepentingan politik bermain, tak terkecuali Indonesia. PKB adalah salah satu partai yang didera konflik internal setidaknya tiga kali sejak dekade pertama berdiri. Periode pertama konflik internal PKB terjadi diawali dengan peristiwa pengajuan impeachment oleh anggota DPR (kecuali fraksi PKB dan FPDKB) terhadap Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai presiden yang dianggap gagal dalam memberikan keterangan soal kasus Brunneigate dan Buloggate. Sebagai respon atas pemecatan terhadap dirinya, Gusdur melakukan manuver politik dengan melakukan pembubaran parlemen melalui Maklumat Presiden. Keputusan luar biasa Gusdur ini kemudian dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak berlaku. PKB kemudian mengajukan protes kepada MPR dengan cara membekukan fraksi PKB. Sebagai konsekuensi

akan hal tersebut, fraksi PKB tidak akan menghadiri Sidang Istimewa MPR dengan agenda impeachment presiden. Namun, meskipun fraksinya telah dibekukan, Matori Abdul Jalil (Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB) dengan dalih mencari alternatif solusi dan menyelamatkan muka Presiden, justru tampak hadir dalam SI MPR tersebut. Kedatangan Matori inilah yang mengakibatkan Ia dipecat dari PKB. Merasa tidak terima dengan pemecatan tersebut, Matori dengan para pendukungnya membentuk PKB tandingan (PKB versi Matori) atau yang juga dikenal dengan PKB-Batu Tulis. PKB versi Gusdur kemudian mengangkat Alwi Shihab sebagai Ketua Umum PKB menggantikan Matori. Akibat konflik yang terjadi tahun 2001 ini, fokus partai dalam melembagakan serta menjaga hubungan baik antar anggota menjadi tidak ada, yang ada hanyalah perpecahan. (Choirie A. E., 2010)

Konflik internal pasca *impeachment* Gusdur tampaknya cukup berpengaruh terhadap penurunan suara PKB hasil Pemilu 2004. Meski demikian, Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudoyono memberikan dua kursi menteri untuk PKB yaitu Alwi Shihab sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Akan tetapi, posisi kedua tokoh ini mendapat penentangan oleh Gusdur dengan alasan tidak boleh rangkap jabatan, mereka harus memilih, apakah partai atau pemerintahan. Akibatnya, Gusdur melakukan pemecatan terhadap kedua tokoh tersebut yang notabene Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf adalah Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Sekjen PKB. Pemecatan inilah menjadi periode konflik internal PKB jilid 2. Gusdur kemudian mengangkat Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz menggantikan Alwi Shihab. Dampak dari konflik jilid 2 ini melibatkan

lebih banyak unsur PKB dan NU, di mana para Kyai Khos yang sebelumnya menjadi pendukung fanatik Gusdur (di konflik internal pertama) justru menyatakan dukungannya terhadap Alwi-Syaifullah. Ujungnya, konflik ini melebar hingga DPW PKB Jawa Timur juga beralih dukungan. Dan tentu saja ini merugikan Gusdur karena DPW PKB Jawa Timur merupakan mesin pendulang suara PKB di Jawa Timur. Konflik internal PKB baik jilid 1 dan 2 dimenangi oleh Gusdur, sehingga pada 2005, berdasarkan hasil Muktamar PKB di Semarang, posisi Ketua Umum Dewan Tanfidz diberikan kepada Muhaimin Iskandar. Dilain pihak, Kyai-Kyai khos pendukung Alwi-Syaifullah keluar dari PKB dan mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Menjelang pemilu 2009, bukannya menjaga soliditas partai, Gusdur justru melakukan pemecatan terhadap Muhaimin Iskandar sang Ketua Umum dengan dalih ketidakloyalan Muhaimin terhadapnya dan PKB. Pemecatan Muhaimin ini tidak melalui forum Muktamar melainkan hanya forum terbatas saja. Bahkan dalam forum tersebut Gusdur memberikan pilihan, apabila forum tidak setuju atas pemecatan Muhaimin maka Gusdur-lah yang akan meninggalkan PKB. Menghadapi pilihan tersebut, meskipun ketidakloyalan Muhaimin belum terbukti, forum terpaksa mengikuti kemauan Gusdur. Merasa pemecatannya tidak berdasar dan tidak konstitusional, Muhaimin dan para pendukungnya mengadakan Musyawarah Luar Biasa (MLB) pada Februari 2008 di Ancol dan menetapkan struktur kepengurusan baru PKB sehingga lebih dikenal dengan sebutan PKB versi Muhaimin atau PKB Ancol. Di lain pihak, Gusdur dan loyalisnya juga mengadakan

MLB di Parung untuk menegaskan kepemimpinan baru PKB versi Gusdur atau lebih dikenal dengan PKB Parung. (Romli, 2010)

Dari ketiga konflik internal PKB ini, nampaknya di konflik ketiga melawan keponakannya sendiri, Gusdur kalah cepat. Muhaimin lebih dulu mendaftarkan PKB-Ancol ke Kemenkumham untuk diverifikasi. Jika pada dua konflik pertama Gusdur yang menang maka untuk konflik ketiga ini Gusdur kalah oleh kecepatan tanggap Muhaimin. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2008 dinyatakan bahwa Muhaimin Iskandar-lah yang sah sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Konsekuensinya, PKB Muhaiminlah yang berhak mengikuti Pemilu 2009.

Putusan MA tentang PKB Muhaimin yang berhak mengikuti pemilu membuat partai ini harus ekstra cepat dalam mempersiapkan tahapannya. Meski proses rekrutmen calon anggota legislatif dari PKB dilakukan tidak seketat pada pemilu 2004, namun setidaknya PKB tetap melakukan seleksi yang melibatkan Tim Mantap dan LPP sehingga kualitas calon juga tetap terjaga. Konflik internal menjelang pemilu tentu berdampak luar biasa terhadap perolehan suara, namun pengalaman ini dijadikan PKB untuk bangkit dan membangun soliditas partai dikemudian hari. Ada upaya yang dilakukan PKB untuk menarik suara-suara dari kantong kyai/ulama menjelang pemilu 2009 dengan memanfaatkan forum Kyai/ulama kampung.

Salah satu upaya yang kemudian dilakukan juga oleh PKB pasca pemilu 2009 adalah menjalin komunikasi kembali dengan Kyai-kyai khos dan kyai lainnya yang sempat terpecah-pecah pasca konflik 2005. Upaya-upaya menjaga soliditas

atau kohesivitas partai akibat perpecahan yang terjadi penting dilakukan demi mewujudkan pelembagaan parpol yang baik. Manajemen konflik yang baik dilakukan oleh PKB dengan tetap menjaga komunikasi dan silaturahmi antar anggota partai dalam setiap tingkatan dan silaturahmi (memberikan bantuan finansial dan program) kepada Nahdhatul Ulama (NU) sebagai pendukung utama PKB dilakukan demi kohesivitas partai.

Setiap partai yang terdiri dari begitu banyak kader maka begitu banyak kepentingan juga ada di sana, baik kepentingan individu maupun kelompok. Berkaca dari ketiga konflik yang pernah terjadi di PKB, ini terjadi manakala faksi-faksi yang ada di dalam tubuh PKB merasa kecewa atau dirugikan. Keberadaan faksi tidak bisa dipungkiri dalam sebuah organisasi, namun bagaimana cara mengelola faksi supaya tidak berujung pada konflik itulah peran pemimpin partai. Dalam perjalannya, selain komunikasi dan silaturahmi yang dilakukan antara PKB dengan NU dan para kadernya maka upaya menjaga kohesivitas/soliditas partai adalah dengan mengembangkan manajemen konflik.

Upaya silaturahmi dan komunikasi antar kader dan pihak NU yang dilakukan oleh PKB merupakan proses pelembagaan partai yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh Panebianco, Randall&Svasand, dan Huntington bahwa pelembagaan adalah cara suatu organisasi menyebarkan nilai-nilai (ideologi), kemampuan beradaptasi termasuk kemampuan untuk bertahan dalam sebuah sistem politik, melakukan manajemen/penyelesaian konflik dengan baik (koherensi), dan menciptakan budaya dan sistem nilai yang penting dalam mewujudkan soliditas partai.

Partai Politik merupakan instrument penting demokrasi. Jika partai politik menjalankan fungsinya dengan baik seperti fungsi rekrutmen politik dan manajemen konflik maka upaya pelebagaan partai politik akan berjalan dengan baik, berbagai upaya pembenahan dilakukan oleh struktur PKB dalam menghadapi berbagai konflik internal yang dihadapi demi melembagakan kembali partai. Upaya-upaya pelebagaan partai yang dilakukan PKB dimulai dengan meneguhkan ideologi PKB yang sejak awal bukanlah partai Islam namun partai kebangsaan, terbuka dan inklusif. Oleh sebab itu, dalam perjalanannya, PKB menerima kader dan caleg dari kalangan non-Muslim.

Langkah selanjutnya yang dilakukan PKB adalah dengan membangun komunikasi dan silaturahmi dengan para Kyai/ulama NU yang sempat terpecah-pecah pada konflik sebelumnya. Merangkul kyai penting dilakukan karena kyai memiliki santri-santri yang dalam politik merupakan potensi lumbung suara atau sumber dukungan suara dalam pemilu. Selain itu, PKB juga melakukan upaya kaderisasi dengan melibatkan organisasi/badan otonom yang berafiliasi dengan PKB dan NU seperti Pemuda Anshor, Fatayat dan Muslimat NU, PMII, Garda Bangsa dan lain-lain. Kaderisasi ini penting dilakukan supaya dalam rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu, PKB tidak kesulitan dalam menjaring calon. Meski sebagian besar kader dan caleg PKB adalah dari NU namun PKB tidak menutup kesempatan bagi pihak eksternal untuk bergabung dengan PKB. Upaya maksimal yang dilakukan oleh PKB dalam membenahi stuktur dan kondusivitas partai serta kemampuan pemimpin dalam mengelola faksi-faksi berdampak baik dalam pelebagaan partai politik. Apa yang terjadi di PKB pasca Pemilu 2009 dan

hasil pemilu 2014 yang menunjukkan tren peningkatan memperlihatkan bahwa PKB telah berupaya membangun kohesivitas atau soliditas partai.

Hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas. Pangkal permasalahannya berawal dari rencana PBNU membentuk Tim Lima atau panitia khusus (pansus) untuk merebut kembali PKB. Alasannya, PBNU menganggap PKB sudah melenceng dari sejarah pendirian partai. Friksi antara PBNU dan PKB tersebut sebetulnya bukan kali pertama terjadi. Pada era kepemimpinan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, keduanya sering saling singgung.

Menjelang bergulirnya Pemilu 2024, ketegangan politik terjadi antara PBNU dan PKB. Kala itu, Gus Yahya menyatakan bahwa PKB bukan partai yang merepresentasikan NU. Sebab, NU sebelumnya sudah memutuskan lewat keputusan Muktamar Nasional untuk mengambil jarak dari politik praktis, termasuk dalam hal ini PKB. Menurut Gus Yahya, meskipun PKB lahir dari tokoh-tokoh NU, namun posisi PBNU hanya sebagai fasilitator karena ada warganya yang ingin membuat partai. Setelah partai terbentuk, PBNU tak lagi ikut campur dan melepaskan diri dari politik praktis yang dijalani PKB. Mendengar pernyataan tersebut, PKB pun merespons santai dan sependapat bahwa PKB sebagai partai politik bukan bagian NU. Sebaliknya, dalam urusan politik NU, PKB yang bertanggung jawab untuk urusan itu. Terbaru, PBNU secara gamblang ingin merebut kembali PKB lewat rencana pembentukan Tim Lima. Upaya perebutan tersebut karena PKB dianggap telah melenceng dari sejarah pendirian partai.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyatakan, salah satu alasan mengapa mereka hendak membentuk Tim Lima karena menganggap PKB sudah menyimpang.

Gus Ipul menyebut tim itu dibentuk sebagai upaya PBNU meluruskan sejarah, sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnyanya, yakni PBNU. Menurut Gus Ipul, elite PKB saat ini kerap membuat pernyataan yang melenceng dari fatusun awal pendirian PKB. Bahkan, Gus Ipul menuding ada upaya yang nyata dan sistematis dilakukan elite PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU. Gus Ipul mengingatkan PKB didirikan oleh struktur NU, mulai dari PBNU sampai tingkat ranting, sehingga PKB tidak akan pernah terbentuk tanpa bantuan struktur NU. Sementara Cak Imin menyatakan bahwa partai yang dia pimpin didirikan bukan hanya untuk kelompok NU. Pasalnya, PKB didirikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan pendiri lainnya untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan pembekalan kepada seluruh anggota legislatif PKB dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau dalam Sekolah Pemimpin Perubahan Wilayah 4. Pernyataan ini juga disampaikan Cak Imin berselang beberapa jam setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merilis akan membentuk tim khusus untuk merebut PKB kembali. (<https://nasional.kompas.com/read/2024>, 2024)

2.3 Gambaran Umum DPC PKB dan PCNU Kabupaten Pekalongan

2.3.1 Profil DPC PKB Kabupaten Pekalongan

1. Visi DPC PKB Kabupaten Pekalongan

Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Visi DPC PKB Kabupaten Pekalongan adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong".

2. Misi DPC PKB Kabupaten Pekalongan

Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Dalam rangka mencapai visi DPC PKB Kabupaten Pekalongan, dirumuskan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius.
- b. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif.
- c. Menyediakan infrastruktur publik yang merata.

- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau.
 - e. Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
 - f. Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat.
 - g. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran.
 - h. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.
 - i. Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas.
 - j. Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti.
 - k. Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.
3. Pengurus DPC PKB Kabupaten Pekalongan

Berikut adalah pengurus DPC PKB Kabupaten Pekalongan masa bakti 2021-2026:

- a. Dewan Syura :
- 1) Ketua : K.H. Abdul Kholiq Al Jaelani
- 2) Wakil Ketua : KH. Adib Karomi
- 3) Wakil Ketua : KH. Badrudin Syukri
- 4) Wakil Ketua : KH. Hasanudin

- 5) Wakil Ketua : KH. Ahmad Muzaki
 - 6) Wakil Ketua : Ky. Nur Khamim
 - 7) Wakil Ketua : Nyai Hj. Maryam
 - 8) Wakil Ketua : Dra. Hj. Nailis Suroyya
 - 9) Wakil Ketua : Nyai Hj. Saqifah
 - 10) Wakil Ketua : Nyai Hj. Ghuroh
- b. Sekretaris : Drs. H. Bisri Romly, M.M.
- 1) Wakil Sekretaris : KH. A. Fauzi Amin
 - 2) Wakil Sekretaris : Ust. Khanan, S.Ag
 - 3) Anggota : Ky. Ahmad Khoirin
 - 4) Anggota : Ky. Abdul Kholiq
 - 5) Anggota : Ky. Mustadlirin
 - 6) Anggota : Ky. Miftakhurrohman
 - 7) Anggota : KH. Kardono
 - 8) Anggota : Ky. Latif Amrin
 - 9) Anggota : KH. Faizin
 - 10) Anggota : Ky. Ibnu Malkan
 - 11) Anggota : HM. Tasuri
 - 12) Anggota : Nyai Hj. Siti Mar'atun
 - 13) Anggota : Rusnaini
 - 14) Anggota : Dra. Fatiyah
 - 15) Anggota : Maslachah HM.
- c. Dewan Tanfidz :

- 1) Ketua : H. Asip Kholbihi, S.H. M.Si.
- 2) Wakil Ketua : Dr. H. Abdul Munir
- 3) Wakil Ketua : H. Masyur
- 4) Wakil Ketua : Drs. H. Zainal Abidin
- 5) Wakil Ketua : Drs. Hj. Hindun, MH.
- 6) Wakil Ketua : H. Saeful Bahri, S.Ag
- 7) Wakil Ketua : Sabdo, SH.
- 8) Wakil Ketua : Hj. Dewi Aida Fitria
- 9) Wakil Ketua : Hj. Nadziroh
- 10) Wakil Ketua : Suparno
- 11) Wakil Ketua : M. Tamrin, S.H.

1.3.2 Profil PCNU Kabupaten Pekalongan

1. Visi PCNU Kabupaten Pekalongan

Visi PCNU Kabupaten Pekalongan adalah “Menjadi organisasi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, serta menjadi garda terdepan dalam memperkuat kerukunan umat beragama dan pembangunan nasional di Kabupaten Pekalongan”.

2. Misi PCNU Kabupaten Pekalongan

Misi PCNU Kabupaten Pekalongan, antara lain:

a. Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.

PCNU Kabupaten Pekalongan akan terus aktif dalam upaya menciptakan suasana toleransi dan kerukunan antar umat beragama di wilayahnya.

- b. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Umat Beragama. PCNU akan terus mendorong umat beragama untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pemahaman agama.
 - c. Menjadi Organisasi yang Mandiri Finansial. PCNU akan berupaya meningkatkan kemandirian finansial melalui berbagai program seperti penggalangan wakaf, zakat, dan infaq, serta pengembangan usaha produktif.
 - d. Meningkatkan Layanan Keagamaan dan Pendidikan. PCNU akan terus memberikan layanan keagamaan dan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.
 - e. Menjadi Garda Terdepan dalam Pembangunan Nasional. PCNU akan terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.
3. Pengurus PCNU Kabupaten Pekalongan

Melalui Surat Keterangan (SK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) nomor: 375/PB.01/A.11.01.45/99/07/2024) tentang Pengesahan PCNU Kabupaten Pekalongan yang dibacakan oleh Sekretaris PWNU Jawa Tengah H Ahmad Fathurrohman dan dibaiat oleh Katib Syuriah PBNU KH Nurul Yaqin Ishak menetapkan susunan pengurus PCNU Kabupaten Pekalongan periode 2024-2029 sebagai berikut:

- a. Rais Syuriah : KH. Baihaqi Anwar
- b. Ketua Tanfidziyah : KH. Muslikh Khudlori

- c. PC Lembaga Dakwah NU Kab. Pekalongan : KH. Ahmad Syafiq, S.Ag.
- d. PC Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Pekalongan : Drs. H. Daenuri, M.Pd.I
- e. PC Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU Kab. Pekalongan : KH. Akhmad Afifudin, S.Pd.I, M.Si.
- f. PC Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Kab. Pekalongan : H. Mujahidin, SH.
- g. PC Lembaga Pengembangan Pertanian NU Kab. Pekalongan : Lukman Hakim, S.TP.
- h. PC Lembaga Falakiah NU Kab. Pekalongan : Ky. Muhammad Al-Faqih
- i. PC Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kab. Pekalongan : Jahirin, SH., MH.
- j. PC Lembaga Pendidikan Tinggi NU Kab. Pekalongan : Dr. M. H.Ali Imron, SE., M.Si.
- k. PC Lembaga Seni Budaya Muslimin NU Kab. Pekalongan : H. Nur Rohim, SAB
- l. PC Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Kab. Pekalongan : H. Subagyo, SH., MM.
- m. PC Lembaga Perekonomian NU Kab. Pekalongan : H. Ruben R. Prabu Faza, SH.

- n. PC Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Kab. Pekalongan : Bashori, SH.
- o. PC Lembaga Bahtsul Masail NU Kab. Pekalongan : KH. M. Khamim
- p. PC Lembaga Takmir Masjid NU Kab. Pekalongan : Kyai Moh. Fauzan
- q. PC Lembaga Kesehatan NU Kab. Pekalongan : dr. H. Ryan Ardhana Putra
- r. PC Lembaga Ta'lif Wan-Nasyr NU Kab. Pekalongan : Muhamad Syaikhul Alim, S.Ag., MSI
- s. PC Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU Kab. Pekalongan : Muhammad Eko Prasetyo, SE
- t. PC Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Kab. Pekalongan : Samsul Bahri S.Ag
- u. KBIHU An-Nahdliyah (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh) : H. Mansur Ahmad

1.3 Dinamika Pemilihan Legislatif DPC PKB Kabupaten Pekalongan

Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik jika rakyat ingin menjadi anggota legislatif maupun jabatan-jabatan politik lainnya. Neumann mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang

mempunyai pandangan berbeda. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum tersebut partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan publik. (Budiardjo, 2018)

PKB meski menyatakan diri sebagai partai terbuka dan inklusif, namun karena ia lahir dari organisasi besar Nahdhatul Ulama maka tentu sebagian besar kader PKB adalah warga *nahdliyin*. Pada masa awal pendiriannya hingga menjelang pemilu 2004, PKB terkesan sebagai partai keluarga Gusdur. Menurut Effendi Choirie, terdapat dikotomi dalam PKB yaitu antara keturunan Gus (berdarah biru NU) yang mempunyai hak istimewa dan kelompok “non Gus” yang tidak memiliki keistimewaan. Dikotomi ini cukup berpengaruh dalam upaya kader meniti karir politik di PKB baik sebagai struktur partai maupun calon anggota legislatif.

Persoalan kaderisasi di PKB pada dasarnya tidak begitu sulit karena PKB berafiliasi dengan organisasi-organisasi seperti Fatayat NU, Muslimat NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Angkatan Muda NU, Pemuda Anshor Garda Bangsa dan organisasi sayap perempuan PKB (PPKB). Kader-kader potensial inilah yang nantinya mengisi jabatan-jabatan struktural partai maupun menjadi calon anggota legislatif. Sebagai partai politik, PKB memiliki sistem rekrutmen calon anggota legislatif sendiri. Berdasarkan kajian LIPI (2005), rekrutmen calon anggota legislatif pada Pemilu 2004 yang dilakukan oleh Tim Mantap lebih pada faktor-faktor senioritas, loyalitas, akhlakul karimah, pengalaman organisasi dan faktor ketokohan. Sedangkan faktor pendidikan dan

pengetahuan dasar berpolitik kurang diperhatikan. Yang mendapat skor penilaian tertinggi adalah faktor senioritas dan pengalaman organisasi di PKB. (Haris, 2005)

Akan tetapi, setelah didera konflik pada 2001, 2005 dan 2008 yang berimbas pada fragmentasi partai dan penurunan suara PKB pada Pemilu 2004 maka PKB mulai berbenah. Pasca konflik internal 2008 yang berujung pada perpecahan PKB menjadi dua kubu, akhirnya PKB kubu Muhaimin Iskandar yang notabene diakui oleh Kementrian Hukum dan HAM sebagai partai yang sah ikut Pemilu 2009 menata ulang struktur partai tak terkecuali kaderisasi dan pola rekrutmen. PKB sebagai partai yang terbuka dan pluralis tidak membatasi keanggotaan berdasarkan agama, ras etnis dan gender. Oleh sebab itu, PKB memberikan kesempatan bagi caleg yang berasal dari agama lain (selain Islam) untuk bisa bergabung bersama PKB baik di jajaran kepengurusan partai maupun dalam pencalegan pemilu 2009. Adapun yang menjadi syarat bagi seorang non Muslim untuk menjadi pengurus partai maupun sebagai caleg adalah mereka sudah mengenal karakter NU, memiliki komitmen untuk memajukan NU dan PKB, dan membangun komunikasi yang baik dengan NU yang sudah lama terbangun sehingga menjadi pertimbangan perekrutan. Adapun pada pemilu 2009, proses rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan melalui seleksi Tim Mantap (Majelis Penetapan) dan dibantu oleh Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) dalam menyusun daftar caleg dan nomor urut.

Menurut hasil wawancara dengan H. Asip Kholbihi selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026 persiapan PKB dalam menghadapi Pemilu 2024 yaitu dengan duduk bersama antara pengurus dan

Dewan Syuro menentukan nomor urut, dan membahas staregi pemenangan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Pekalongan.

Dapat diketahui bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2024 sudah ada Tim Mantap, Dewan Syuro, Dewan Tanfidz kemudian ada reperesentasi perempuan dan ada lembaga pemenangan pemillu 2024. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penentuan nomor urut misalnya didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasinya. Seperti yang dinyatakan oleh H.Edy Haryanto selaku Anggota Fraksi DPC PKB dapil 1 No urut 1 di Kabupaten Pekalongan periode 2024-2029:

“Soal pendidikan soal pengalaman track record-nya, soal pengalaman organisasinya, di NU apakah ada perannya, semakin tinggi record-nya maka semakin tinggi juga kita punya kriteria. Karena itu juga berpengaruh pada penempatan misalnya nomor urut. (wawancara tgl 15/04/2025, pukul 10.00 wib)

Pertimbangan dalam penentuan nomor urut didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasinya. Kalau ia pimpinan organisasi, kemudian pimpinan di NU apalagi, berarti skornya makin tinggi meskipun pada akhirnya partai tetap punya pertimbangan yang sangat subjektif di akhir nanti karena misalnya melihat dinamika, melihat situasi untuk partai bisa ambil keputusan itu.

Tak dapat dipungkiri bahwa akibat konflik yang mendera elit politik PKB yang berdampak pada perpecahan cukup berpengaruh pada persiapan pemilu 2024. Namun hasil pemilu 2024 memang mengejutkan, di mana banyak pihak yang sedari awal sudah pesimis bahwa DPC PKB Kabupaten Pekalongan akan terjun bebas dalam pemilu 2024, akan tetapi justru perolehan suara DPC PKB Kabupaten Pekalongan malah justru meningkat. Meningkatnya suara PKB cukup signifikan,

Pemilu 2024 menghasilkan 179.049 suara di DPRD Kabupaten Pekalongan.

Berikut adalah tabel perolehan suara DPC PKB Kabupaten Pekalongan:

Tabel 1 Perolehan Suara DPC PKB Kabupaten Pekalongan

No.	Tahun Pemilu	Jumlah Suara	Jumlah Kursi di DPRD Kab. Pekalongan
1.	2009	125.154	11
2.	2014	131.986	12
3.	2019	147.648	15
4.	2024	179.049	14

Sumber: KPU Kab.Pekalongan

Melalui pembenahan struktur partai, sistem kaderisasi dan rekrutmen politik, DPC PKB Kabupaten Pekalongan berupaya melakukan konsolidasi internal partai. Selain itu, PKB juga melakukan konsolidasi di tingkat Kyai-kyai pesantren yang berperan penting bagi PKB karena bagaimanapun, pesantren adalah lumbung suara PKB. Kyai dan tokoh pesantren merupakan lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Dalam Pemilihan Umum, suara kyai dan santri-santrinya selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya memperoleh dukungan dan simpati dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kyai, banyak partai politik yang menempatkan kyai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan Kyai tersebut dapat menjadi *vote getter* dalam pemilu.

Menurut KH. Baihaqi Anwar selaku Rais Syuriah PCNU Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa:

“Ada yang namanya (kyai) popularitas, ada yang namanya (kyai) elektabilitas. Kyai itu ulama-ulama besar itu kita jauh lebih mudah dalam pengangkatan popularitas, tapi elektabilitasnya belum tentu sama dengan popularitasnya. Salah satu contoh kenapa sih ada beberapa ulama yang satu dalam

berpolitik itu bisa dituruti oleh jemaahnya, namun ada satu yang tidak dituruti oleh jemaahnya". (wawancara tgl 03/05/2025, pukul 15.30 wib)

Berdasarkan wawancara dengan KH. Baihaqi Anwar di atas, maka dapat diketahui bahwa ibarat di NU itu ada Kyai yang tidak turun gunung, kerjanya ngajar dan ketika dia mendukung PKB maka santrinya pasti akan nurut, karena ia tidak berfikir pragmatis dan dia mengedepankan kesejahteraan santrinya. Nah Kyai yang berpolitik, ini hanya mementingkan dirinya sendiri, santrinya tidak dapat apa-apa, tidak dapat imbas dari politik itu sendiri. Makanya akhirnya, dalam agama ia dituruti, namun dalam politik tidak dituruti oleh santrinya. Dari tipe-tipe Kyai tersebut bisa dibilang PKB berupaya untuk bisa merangkul kesemuanya yaitu Kyai yang memiliki popularitas dan juga Kyai yang memiliki elektabilitas. Upaya merangkul kyai-kyai tersebut (terutama Kyai khos) dilakukan PKB pasca Pemilu 2024 demi mewujudkan soliditas partai yang mengalami fragmentasi pada 2024. Berdasarkan hasil perolehan suara pada pemilihan legislatif 2024, PKB menunjukkan peningkatan suara jika dibandingkan pemilu sebelumnya.

Keberhasilan DPC PKB dalam pemilu legislatif Kabupaten Pekalongan tidak lepas dari struktur yang rapi, yang paling utama adalah kondusivitas partai politik itu sendiri, dan bagaimana partai di tingkatan masing-masing dalam perekrutan calon. Adapun dalam perekrutan calon, ada hal-hal yang diperhatikan yaitu popularitas calon, segi finansial dan segi jaringan

Sselain merekrut dari kalangan internal PKB dan organisasi afiliasinya, PKB juga memberikan kesempatan bagi kalangan eksternal untuk bisa menjadi calon anggota legislatif PKB pada Pemilu 2024 di Kabupaten pekalongan yang lalu.

Seperti yang diketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat, Edi Hermanto selaku warga NU di Kabupaten Pekalongan yang memilih PKB pada pemilihan legislatif tahun 2024, mengatakan bahwa:

“Sebagai pemilih, Saya melihat PKB ini membuka peluang bagi pihak internal maupun eksternal PKB untuk bergabung, PKB memang memberikan prioritas kepada para tokoh masyarakat, kalangan akademisi, bahkan artis dan lain – lain, Saya juga menghargai peluang yang diberikan PKB kepada masyarakat umum yang ingin menjadi caleg di 2024 mendatang, yang terpenting mereka memiliki elektabilitas dan kualitas dan bersedia untuk berkomitmen dalam membangun bangsa bersama PKB”. (wawancara tgl 18/04/2025, pukul 11.00 wib)

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Niscrochah selaku Ketua Muslimat NU Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa:

“Kalau yang dari luar NU kemarin mungkin amunisi jaringannya, uangnya ketika dicalonkan di PKB tidak sekuat yang dari NU, meski secara hak mereka memiliki peluang yang sama. Kalau dari luar itu juga banyak, misalnya mereka tokoh, pengusaha, tapi tidak semuanya berhasil”. (wawancara tgl 03/05/2025, pukul 12.30 wib)

Dapat diketahui bahwa mengenai perekrutan calon legislatif dari partai PKB di wilayah Kabupaten Pekalongan di mana PKB mencari calon yang bukan saja para aktivis-aktivis tapi juga tokoh-tokoh masyarakat dan pihak eksternal PKB/NU. Dalam perekrutan DPC PKB Kabupaten Pekalongan mencari yang berbasis bukan saja para aktivis-aktivis tapi juga tokoh-tokoh masyarakat direkrut, hal ini digunakan untuk penyeimbang informasi. Kalau di Kabupaten pekalongan lebih cenderung yang jadi di DPRD adalah orang-orang yang berafiliasi dengan NU tidak di luar. Upaya kaderisasi dan rekrutmen yang dilakukan DPC PKB Kabupaten Pekalongan pada pemilu 2024 merupakan pembenahan internal sebagai bagian dari pelembagaan partai seperti yang diungkapkan diatas bahwa pelembagaan adalah upaya menjadikan partai itu solid.